

# SAMBUTAN

*Pontjo Sutowo*



## **15 Tahun Aliansi Kebangsaan**

**Peluncuran Buku "Apa Jadinya Dunia tanpa Indonesia?:  
Epos Sumbangsih Cerlang Nusantara sebagai Pandu Masa Depan"**



**Rabu, 29 Oktober 2025**

## **Pontjo Sutowo**

### **KETUA ALIANSI KEBANGSAAN**

Yth. Dr. H. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan RI;  
Yth. Bapak Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri RI;  
Yth. Prof Dr. Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI;  
Yth. Ketua Forum Rektor Indonesia atau yang mewakili;  
Yth. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang mewakili;  
Yth. Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, atau yang mewakili;  
Yth. Prof. Jatna Supriatna, Ph.D;  
Yth. Bapak Ir H. Aburizal Bakrie, Pendiri Yayasan Dana Darma Pancasila;  
Yth. Prof. Dr. Franssiskus Xaverius Muji Sutrisno, Budayawan;  
Ibu Omi Komariah Madjid, Ketua Dewan Pembina Nurcholis Madjid Society;  
Bapak Ahmad Juwani, Ketua Pengurus Yayasan Dompot Dhuafa;  
Bapak Adi Prinantyo, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas;  
Para undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkenannya, pada hari ini, kita semua diberi kesehatan untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Aliansi Kebangsaan ke-15 masih dalam suasana peringatan momen historis Sumpah Pemuda. Aliansi Kebangsaan yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 2010 didasari oleh kepedulian para pendirinya untuk ikut memajukan kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila dan diperuntukkan sebagai wadah perjuangan bagi kaum cendekiawan untuk ikut membangun negeri dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi.

Hari Sumpah Pemuda dipilih sebagai moment pendirian Aliansi Kebangsaan karena menyadari bahwa Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah penting dalam proses "kebangsaan (*nationhood*) menjadi Indonesia". Dari peristiwa sejarah Sumpah Pemuda tersebut, ada "kesadaran dan pengakuan" atas perbedaan-perbedaan, kemudian "berkehendak" yang kuat untuk melebur dalam satu bangunan ke-Indonesiaan. Inilah "janji kebangsaan" yang merupakan modal sosial penting sekaligus "cerlang" bagi perjuangan kemerdekaan di masa lalu dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia ke depan.

Bangsa Indonesia juga telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai "nilai bersama" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kemudian ditetapkan sebagai "Norma Fundamental Negara (*Staats Fundamental Norm*)" yang dituliskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam kedudukannya sebagai *staats fundamental norm*, Pancasila hakikatnya merupakan ide hukum atau cita hukum (*recht idee*) yang tertinggi yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila seharusnya menjadi norma dasar dan sumber dasar bagi pembentukan konstitusi Indonesia.

Namun setelah 97 tahun sumpah Pemuda diikrarkan dan 80 tahun Pancasila ditasbihkan sebagai dasar filosofis dan ideologi negara, semangat kebangsaan kita seakan mulai memudar. Dan Pancasila yang telah terbukti merupakan ideologi tahan uji belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dan menjelma ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih terdapat jurang yang kian lebar antara idealitas dengan realitas aktualisasinya. Bahkan, kita seakan menjauh darinya.

Pancasila belum sungguh-sungguh didalami dan dikembangkan menjadi "ideologi kerja (*working ideology*)" dalam praksis pembangunan yang memandu kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Dengan kata lain, ideologi Pancasila itu belum dijadikan sebagai kerangka paradigmatis dalam pembangunan nasional. Pancasila sebagai norma dasar juga belum sepenuhnya mewujudkan ke dalam konstitusi kita terutama setelah empat kali amandemen.

Untuk itulah Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, FKPP, HIPMI, Media Kompas, PPAD, dan beberapa mitra strategis lainnya, melalui diskusi yang cukup panjang, berusaha menjadikan Pancasila dari kerangka normatif dan konseptual menjadi "kerangka operasional" (paradigma) pembangunan nasional dalam tiga ranah kehidupan sosial yaitu: Ranah Tata Nilai, Ranah Tata Kelola, dan Ranah Tata Sejahtera. Hanya dengan menjadikannya sebagai paradigma pembangunan nasional, Aliansi Kebangsaan berkeyakinan, bangsa Indonesia dapat menjaga Pancasila sebagai "Titik Temu, Titik Tumpu, dan Titik Tuju" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai titik temu, Pancasila telah mempersatukan seluruh perbedaan dan kemajemukan bangsa ini untuk hidup bersama dalam bangunan ke-Indonesiaan. Sedangkan sebagai "titik tumpu" sudah seharusnya Pancasila menjiwai dan mewujudkan ke dalam konstitusi kita yang berisi logika, sistematika, dan struktur dasar kenegaraan kita. Dan sebagai "titik tuju", Pancasila seharusnya teraktualisasikan ke dalam "Haluan Negara" yang menjadi penuntun arah pembangunan bangsa dan Negara kita.



Berangkat dari kehendak untuk menjadikan Pancasila sebagai mainstream paradigma pembangunan nasional dan terus mengembangkan epistemologi Pancasila sebagai jembatan aktualisasinya, Aliansi Kebangsaan bersama beberapa tokoh filantropis lainnya yang peduli dengan kebangsaan kita, juga meluncurkan inisiatif "Dana Darma Pancasila". Inisiatif ini dimaksudkan untuk mengajak semakin banyak cendekiawan dalam mengembangkan epistemologi Pancasila dengan memberi bantuan dana penelitian dan kerja ilmiah dalam isu-isu yang terkait dengan Tiga Ranah Pancasila.

#### **Para undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati,**

Setelah 27 tahun reformasi dan diberlakukannya UUD 1945 hasil empat kali amandemen, bangsa Indonesia telah meraih berbagai kemajuan incremental dan perubahan mendasar dengan berbagai implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus disadari, selain membawa implikasi positif, amandemen UUD 1945 juga telah menimbulkan berbagai implikasi negatif pada tiga ranah kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.

Pada ranah tata nilai, etik mengalami kemunduran. Dengan meluluhnya dimensi etik, Indonesia sebagai bangsa majemuk kehilangan basis dan simpul rasa saling percaya. Tanpa basis integritas, cita persatuan menjelma jadi perseteruan. Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dirayakan dengan surplus ritual dan ucapan, namun miskin penghayatan dan pengamalan. Dalam realitasnya, Pancasila tidak lagi dijunjung tinggi sebagai "titik temu, titik tumpu, dan titik tuju" kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada ranah tata kelola politik kenegaraan, kebebasan yang dimungkinkan oleh demokrasi harus dibayar mahal dengan robohnya rumah tradisi kekeluargaan. Desain demokrasi dan kelembagaan negara menyimpang dari prinsip negara hukum, negara persatuan dan negara keadilan seperti dikehendaki oleh cita negara Pancasila. Berdasarkan ontologis pendirian negara, Indonesia yang dikehendaki adalah negara kekeluargaan yang bersifat inklusif yang memberi ruang bagi "partisipasi" segala keragaman kekuatan rakyat. Dalam mengusung konsepsi negara kekeluargaan seperti itu, dan sebagai implementasi semangat Pancasila, maka prinsip demokrasi kita seharusnya adalah demokrasi permusyawaratan.

Prinsip demokrasi permusyawaratan tentu harus tercemin dalam kerangka representasi dan modus pengambilan keputusan yang bersifat inklusif dengan menyediakan ruang bagi partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat baik dalam kerangka representasi maupun pengambilan keputusan, kekuatan Negara (*state*) menjadi dominan dalam relasi bernegara dan berp otensi menjadi tirani. Acemoglu dan Robinson dalam bukunya "*The Narrow Corridor: States, Societies, and The Fate of Liberty* (2019)" mengingatkan akan pentingnya keseimbangan antara kekuatan Negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Untuk itulah pemberdayaan masyarakat menjadi penting.



Pada ranah tata sejahtera, tata kelola ekonomi belum mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan. Kesenjangan sosial masih lebar karena pengabaian prinsip keadilan dalam distribusi kesejahteraan menyangkut harta, kesempatan dan privilese sosial. Kita masih terjebak dalam paradigma ekonomi lama dengan ekonomi ekstraktif yang berbasis sumber daya alam (*resource based economy*). Terperangkap dalam paradigma itu membuat kita kehilangan wahana peningkatan kapabilitas belajar untuk mengolah dan mengembangkan nilai tambah potensi sumberdaya alam kita.

Kita memang kaya akan sumberdaya alam, tetapi bukan menjadi negara "kaya" (*rich, wealthy*) cita-cita kemerdekaan kita, melainkan menjadi negara yang "makmur" (*prosper*). Sejumlah negara bisa menjadi kaya hanya karena memiliki satu atau dua sumberdaya alam yang berlimpah, namun kekayaan seperti itu tidak bisa berkelanjutan. Untuk menjadi makmur, banyak negara sudah mentransformasikan ekonominya berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan yang bisa meluaskan mobilitas vertikal secara lebih inklusif.

Kita juga belum berhasil mengupayakan perekonomian yang mandiri dengan jiwa merdeka, inklusif yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi, berkeadilan serta berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat koperatif) sebagaimana dicanangkan oleh para pendiri bangsa. Seharusnya dipastikan bahwa yang berkembang di negeri ini bukan sekadar pembangunan di Indonesia, tetapi pembangunan Indonesia yaitu pembangunan dari, oleh, untuk seluruh rakyat Indonesia dan kemudian untuk dunia. Untuk itulah pentingnya mengembangkan model pembangunan partisipatif (*participatory development*) yang bertumpu pada komunitas (*community driven development*).

Dengan memperhatikan berbagai distorsi dan destruksi dalam tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera dalam rentang waktu 27 tahun reformasi, bisa ditarik kesimpulan bahwa demokrasi dan tata kelola negara yang berkembang tidak berada di jalur yang tepat. Distorsi dan degenerasi demokrasi bukan hanya mencerminkan kegagalan perseorangan, akan tetapi kegagalan sistemik yang sudah jauh dari "cita (konsep) Negara Indonesia" berdasarkan Pancasila yang hendak dibangun oleh para pendiri bangsa yaitu: Negara Hukum, Negara Persatuan, dan Negara Keadilan.

Oleh karena itulah, Aliansi Kebangsaan menawarkan untuk "kembali kepada fitrah cita negara Pancasila". Untuk kembali kepada fitrah cita Negara, kita dapat memulai dengan proses penemuan kembali diri kesejarahannya (*historical selfinvention*). Bangsa ini dapat bercermin pada dirinya sendiri: mengenali akar budaya, alam, dan kesejarahannya, memahami kontribusi pentingnya dalam pergaulan dunia, serta menegaskan kembali martabatnya di pentas global.

Mengenali potensi, kekuatan, kemampuan, dan mempelajari kejayaan bangsa masa lalu bukan hanya tentang nostalgia, tetapi juga tentang membangun visi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah dan gemilang. Kisah-kisah kejayaan masa lalu dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan "imajinasi" masa depan bagi keberlanjutan bangsa dalam upaya mencapai tujuan dan cita-citanya.

Tentu menjadi tantangan bangsa ini, bagaimana meng-kontekstualisasikan kembali cerlang warisan peradaban bangsa ini menjadi pandu masa depan. Oleh karena itulah dalam peringatan ulang tahun Aliansi Kebangsaan kali ini diangkat tema: **"Cerlang Nusantara sebagai Pandu Masa Depan"**. Latar belakang sosiokultural dan warisan peradaban yang kaya memberikan kedalaman strategis yang dapat diproyeksikan dalam setiap perjuangan bangsa Indonesia ke depan.

#### **Para Undangan dan hadirin yang saya hormati,**

Bertepatan dengan peringatan HUT Aliansi Kebangsaan tahun ini, akan diluncurkan kehadiran buku yang ditulis oleh Sdr. Yudi Latif dengan judul: **"Apa Jadinya Dunia tanpa Indonesia?: Epos Sumbangsih Cerlang Nusantara sebagai Pandu Masa Depan"**. Dengan pengisahan atau narasi yang sangat mengalir, buku yang lahir dari fakta dan wacana ilmiah ini berhasil mengungkapkan berbagai potensi, kekuatan, kemampuan dan kejayaan Indonesia serta signifikansinya bagi dunia.

Sejak awal, Aliansi Kebangsaan sangat mendukung dan berusaha memfasilitasi ikhtiar penulisan buku ini, sekurang-kurangnya karena tiga alasan, yaitu: (1) Belum pernah ada buku yang ditulis untuk mengungkap tentang signifikansi Indonesia bagi dunia dengan cakupan isu dan bidang yang begitu luas serta multidisiplin seperti buku ini; (2) Saya percaya, penulisan buku ini didasari oleh visi besar Yudi Latif untuk membawa Indonesia kembali ke panggung dunia agar Indonesia menjadi pemimpin peradaban global di masa depan; (3) Buku ini sangat relevan dengan upaya merawat kebangsaan Indonesia melalui *"nation building"* ditengah hiruk pikuk dinamika perkembangan zaman, yang selama ini terus diperjuangkan oleh Aliansi Kebangsaan.

Saya berharap, buku ini dapat membuka cakrawala baru dengan perspektif yang berbeda bagi pembaca untuk memahami sejarah panjang kealaman, kemanusiaan, dan peradaban Nusantara dan signifikansinya bagi dunia. Buku ini dapat membantu kita untuk terus belajar menjadi merdeka, mengenali diri, menjaga martabat, dan menghilangkan perbudakan jiwa peninggalan penjajah yang masih tersisa sampai saat ini. Kita terlalu lama mengalami apa yang disebut hegemoni peradaban kolonialisme.

### Hadirin yang saya hormati,

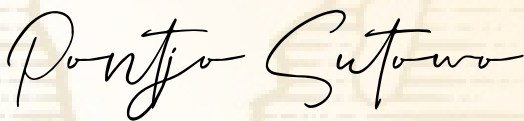
Sebagai bangsa yang lahir dari gagasan para kaum cendekiawan melalui Budi Utomo dan Sumpah Pemuda di masa lalu, Aliansi Kebangsaan yang merupakan jaringan intelektual lintas kultural dan lintas keyakinan, yang dipersatukan oleh kepedulian yang sama untuk menguatkan dan mengembangkan kebangsaan Indonesia, ingin mengajak para cendekiawan/intelektual untuk kembali terpanggil dalam memecahkan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi berdasarkan Pancasila.

Aliansi Kebangsaan percaya bahwa perubahan sejati lahir dari kesadaran dan kekuatan ide para cendekiawan dengan otoritas intelektualnya. Sejarah membuktikan bahwa dalam setiap fase penting perjalanan sejarah bangsa, kaum cendekiawan selalu memainkan peran strategis sebagai penunjuk arah, penjaga nurani publik, dan pembentuk kesadaran kolektif.

Akhirnya saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas kehadiran para undangan dalam acara peringatan HUT ke-15 Aliansi Kebangsaan pada hari ini. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 29 Oktober 2025  
Ketua Aliansi Kebangsaan



**Pontjo Sutowo**